

Artikel Penelitian

Pengaruh Belanja Modal, Bantuan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan terhadap Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah

Daffa Talenta¹, Susilaningtyas Budiana Kurniawati², Syahriar Abdullah^{3*}

¹⁻³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta, Jawa Tengah; E-mail :

daffatalenta76@gmail.com

*Penulis Korespondensi : daffatalenta76@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to find out the impact of capital expenditure, social assistance expenditure, health expenditure and education expenditure budgeted by the Central Java Provincial Government on the percentage of poor people in Central Java Province. The method used in this study is panel data regression with the percentage of poor people in Central Java Province as the dependent variable and capital expenditure, social assistance expenditure, health expenditure and education expenditure as independent variables. The results of the study concluded that Capital Expenditure and Social Assistance Expenditure disbursed by the regional government have no effect on the percentage of poor people in Central Java Province, while Health Expenditure and Education Expenditure disbursed by the Central Java Provincial Government have a negative effect on the percentage of poor people in Central Java Province. The conclusion that can be drawn is that the government can carry out more efficient budgeting and can increase the types of direct expenditure such as School Operational Assistance (SOC) and Health Operational Assistance (HOA) expenditure.

Keywords: Capital Expenditure; Education Expenditure; Health Expenditure; Poor Population; Social Assistance Expenditure.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini ialah mencari tahu dampak dari belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja kesehatan dan belanja pendidikan yang dianggarkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi data panel dengan presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel dependen dan belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja kesehatan serta belanja pendidikan sebagai variabel Independen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial yang digelontorkan oleh pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, sementara Belanja Kesehatan dan Belanja Pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pemerintah dapat melakukan penganggaran belanja yang lebih efisien serta dapat memperbanyak jenis belanja yang bersifat langsung seperti belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Kata Kunci: Belanja Bantuan Sosial; Belanja Kesehatan; Belanja Modal; Belanja Pendidikan; Penduduk Miskin.

Diterima: 18 Mei, 2026
Direvisi: 22 Juni, 2026
Diterima: 20 Juli, 2026
Diterbitkan: 10 Agustus, 2026
Versi sekarang: 10 Agustus, 2026



Hak cipta: © 2025 oleh penulis.
Diserahkan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Pandemi *CoronaVirus 2019 (COVID-19)* merupakan pandemi virus corona yang pertama kali muncul di Bulan Desember 2019 di Tiongkok. (N. W. Putri & Rahmah, 2020) menyatakan bahwa Kasus *COVID-19* yang pertama kali terdeteksi di Negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua kasus yang dilaporkan. Kurang dari sebulan kemudian, tepatnya jatuh pada tanggal 31 Maret 2020, jumlah kasus pasien positif telah mencapai 1.528

dengan 136 kematian. Angka kematian tinggi ini membuat Indonesia memiliki tingkat mortalitas *COVID-19* tertinggi di Asia Tenggara. Data terbaru pada akhir April 2020 menunjukkan peningkatan signifikan kasus positif menjadi 7.775 dengan jumlah kematian mencapai 647 jiwa. Meningkat pesatnya kasus *COVID-19* di Indonesia membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk daerah yang diduga terinfeksi Virus *COVID-19*, dengan pertimbangan seperti jumlah kasus/angka kematian akibat virus tersebut meningkat secara masif dan menyebar cepat ke berbagai wilayah sekitar sebagaimana yang di tuangkan di (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 2020).

Kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah bagaikan pisau bermata dua, yang dimana tujuan dari PSBB ialah untuk menghentikan laju penyebaran virus *COVID-19* namun disisi lain, PSBB menyebabkan Perusahaan melakukan PHK besar-besaran sebagai imbas berhentinya kegiatan operasional Perusahaan guna mengurangi beban yang ditanggung Perusahaan. Tingginya angka pengangguran yang terjadi disebabkan oleh kebijakan PHK massal yang dilakukan Perusahaan dan membuat masalah kemiskinan semakin parah sebagaimana riset yang disimpulkan oleh (Gunadi *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan (Ningtias & Anwar, 2021) menyatakan jika tingginya angka pengangguran, berdampak positif dan signifikan terhadap tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah, pentingnya peran pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan meyakinkan Masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana merupakan kesimpulan yang ditekankan oleh peneliti.

Tabel 1. Tabel Garis Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa

Nama Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	637.260	680.401	697.638	738.955	792.515
Jawa Barat	386.198	410.988	427.402	452.580	495.229
Jawa Tengah	369.385	395.407	409.193	438.833	477.580
DI Yogyakarta	432.026	463.479	482.855	521.673	573.022
Jawa Timur	397.687	416.001	429.133	460.909	507.286
Banten	467.726	508.091	530.363	570.368	618.721

(Sumber : Badan Pusat Statistik 2023)

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah dapat diobservasi atas garis kemiskinan yang berupa pendapatan per kapita/bulan seseorang, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa garis kemiskinan perorangan pada periode Bulan Maret 2023 ialah Rp 550.458,00 per bulan dengan komposisi kebutuhan makanan sebesar Rp 408.522,00 atau sebesar (71,21%) dan kebutuhan non makanan sebesar Rp 141.936,00 atau sebesar (25,79%) (BPS, 2023). Berdasarkan kajian data dari Badan Pusat Statistik di atas terkait garis kemiskinan dilihat dari pendapatan seseorang per bulan, terdapat tiga Provinsi di Pulau Jawa yang pendapatan per kapita per bulan masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan masyarakat. Provinsi Jawa Barat memiliki pendapatan masyarakat yang sebesar Rp 495.229,00 di Tahun 2023, sementara itu Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan berkisar Rp 477.580,00 di Tahun 2023, Provinsi Jawa Timur dengan tingkat rata-rata pendapatan berkisar Rp 507.286,00 di Tahun 2023. Badan Pusat Statistik juga menjelaskan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga miskin di Negara Indonesia adalah 4,7 orang per rumah tangga (BPS, 2023), yang membuat faktor populasi suatu daerah memiliki peran dalam indeks kemiskinan, jumlah populasi suatu daerah memiliki dampak positif dan signifikan kepada Indeks kemiskinan di suatu daerah, sebagaimana (Hafiz & Kurniadi, 2024) katakan, alasan yang disebutkan dikarenakan penduduk yang tinggal di daerah tersebut kesulitan untuk mendapatkan akses kebutuhan dasar yang memadai sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dari latar belakang diatas, diperlukan penelitian lanjutan guna meneliti pengaruh belanja diatas terhadap Persentase jumlah penduduk Miskin.

2. Tinjauan Literatur

Teori Agensi

Teori agensi yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) merupakan teori konsep ekonomi dan manajemen yang menggambarkan hubungan antara dua belah pihak. teori ini menjelaskan tentang pembagian peran kedua pihak tersebut, yaitu pihak pemilik atau

pemberi tugas (*Principal*) yang memiliki sumber daya atau kepentingan dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas kepada pihak lain, dan pihak pengelola atau penerima tugas (*agent*) yang memiliki peran untuk melaksanakan tugas yang diberikan pemberi tugas (*Principal*) untuk bertindak atas nama pemberi tugas (*Principal*) dan mengelola sumber dayanya. Fungsi hubungan yang terjadi antara pemberi tugas (*Principal*) dengan penerima tugas (*agent*), yang sebagaimana dijelaskan di dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa fungsi hubungan antara kedua entitas bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan koordinasi yang teratur antara pemberi tugas (*Principal*) dengan penerima tugas (*agent*), alasan utama dari keselarasan dan koordinasi yang teratur antara dua belah pihak ialah menghindari konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976).

Ketidakselarasan kepentingan antara pemilik modal dan pihak yang mengelola perusahaan (manajemen) memicu biaya keagenan. (Rubi & Fitra, 2025) berpendapat bahwa biaya ini muncul karena pemilik perlu mengeluarkan dana untuk memastikan manajemen bertindak sesuai dengan tujuan mereka. Setiap keputusan manajemen yang tidak sejalan dengan peningkatan kemakmuran pemilik akan mengakibatkan kerugian finansial yang disebut dengan residual loss yang pada dasarnya menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat menjalin hubungan kontraktual. Pada sisi lainnya, klien memerlukan informasi kepemilikan hanya dapat mengakses data internal yang terbatas. Menurut teori keagenan, ada kontrak kerja yang mengatur asimetri kepentingan antara kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan (Said et al., 2022) (Agung Prasetyo, 2022). (Abidin et al., 2021) menekankan bahwa hal lain yang dapat menjadi permasalahan hubungan antara agen dengan principal ialah disaat salah satu eksekutif (yang dalam hal ini merupakan kelompok masyarakat tertentu) mendorong kepentingan pribadi kelompok mereka ketimbang kepentingan masyarakat secara menyeluruh, dalam situasi ini pemerintah sebagai agen (pemerintah daerah) harus bersikap adil dan menyelesaikan semua jenis konflik kepentingan melalui jalur hukum, aturan serta kebijakan yang berlaku.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun. Aset-aset ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Dengan pengelolaan yang efektif, belanja modal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah daerah, sebagaimana hasil riset dari (Ester Trivona, 2021). Belanja Modal sebagai pengeluaran yang bertujuan untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap, yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu periode akuntansi dan memenuhi kriteria minimal kapitalisasi yang ditetapkan. Statement diatas menekankan Belanja Modal sebagai belanja yang berguna untuk menambah asset guna menunjang kegiatan operasional Lembaga Pemerintah Daerah (Kemenkeu, 2023).

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan alokasi anggaran negara yang ditujukan untuk memberikan transfer dana, item, atau jasa yang diperuntukan kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, dengan maksud untuk mengurangi risiko sosial dan meningkatkan kualitas hidup (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, 2019). Menurut (R. Z. Putri & Effendi, 2021) Manfaat Belanja Bantuan Sosial ditunjukan kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi masyarakat yang hidup disuatu daerah yang riskan akan permasalahan sosial serta menstimulasi kemampuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kesimpulan yang didapat dari penjelasan di atas ialah Belanja Bantuan Sosial memiliki peran guna membantu meringankan masyarakat yang kurang mampu dari dampak masalah sosial.

Tujuan dari Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tujuan utama berupa Memberikan bantuan untuk meng-cover beban sosial, memproteksi, dan merestorasi kondisi fisik, mental, sosial, serta psychosocial dan kemampuan ekonomi individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang terdampak oleh bencana sosial, dengan tujuan untuk memberdayakan mereka dan memungkinkan mereka untuk hidup secara wajar (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, 2019). Undang-undang tersebut

juga menekankan bahwa masyarakat yang menjadi target program bantuan sosial, akan dapat mengharapkan bantuan berupa: uang, barang dan jasa.

Belanja Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam mencapai kesejahteraan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kehadiran anak di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya. Pelayanan publik di bidang kesehatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan fungsi undang-undang. Dalam konteks penyelenggaraan ini, penyelenggaraan pelayanan publik mencakup entitas yang dimiliki pemerintah, baik daerah atau pusat. Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Peningkatan layanan kesehatan pada dasarnya adalah bentuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera (*wellbeing of society*). (Mardiana, 2021) berpendapat bahwa tingkatan kesehatan penduduk memiliki dampak signifikan terhadap kemakmuran, karena erat kaitannya dengan tingkatan penduduk miskin. Sebaliknya, kondisi kemiskinan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Belanja Pendidikan

Belanja Pemerintah Pusat merupakan belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat guna menjalankan berbagai jenis fungsi yang memiliki kaitan dengan pemenuhan kebutuhan pemerintah dan masyarakat (Kemenkeu, 2020). Belanja Pendidikan adalah Alokasi anggaran pendidikan berasal dari tiga sumber utama: alokasi melalui kementerian/lembaga pemerintah, transfer ke pemerintah daerah, dan pengeluaran pembiayaan. Belanja pendidikan menjadi pengeluaran yang tanggung jawabnya dipegang oleh Pemerintah, kecuali untuk pendidikan kedinasan. Anggaran Belanja Pendidikan dialokasikan sekurang kurangnya 20% dari persentase keseluruhan belanja negara. Belanja Pendidikan diklasifikasikan sebagai hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah guna melaksanakan fungsi Pendidikan di daerahnya masing-masing (Peraturan Pemerintah Nomor 18, 2022).

3. Metode

Penelitian mencakup data Laporan keuangan pemerintah daerah di tiga puluh lima kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian memiliki wujud berupa data panel dengan rentan waktu laporan keuangan dari periode 2019 hingga periode 2023 atau lima periode, sebagai data utama variabel independen berupa Belanja Modal (BM), Belanja Bantuan Sosial (BBS), Belanja Kesehatan (BK) dan Belanja Pendidikan (BP). Penelitian ini berpusat pada data persentase jumlah penduduk miskin (V). Data ini diambil dari tiga puluh lima kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2023, dan diperluas hingga 2024 untuk melihat dampak dari variabel independen sebelumnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan data yang diperoleh dari sumber sekunder.

Data diperoleh dari website halaman resmi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, Laporan Indeks kemiskinan yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data menggunakan metode time series dan cross section baik data variabel independen maupun dependen yang menghasilkan jenis data berupa data panel. Persentase jumlah penduduk miskin yang merupakan variabel dependen diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS), sementara variabel independen berupa belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja kesehatan dan belanja pendidikan diperoleh melalui laporan keuangan masing – masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019 – 2023. Data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yaitu berupa data panel yang merupakan gabungan antara data cross section yang diidentifikasi dari tiga puluh lima kabupaten dan kota di Provinsi Jawa tengah dan data time series yang teridentifikasi dari rentan data periode yang diolah, yaitu periode 2019 – 2023. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi statistik di computer bernama Eviews 12.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk membandingkan pendekatan model CEM dengan FEM untuk menentukan pendekatan model mana yang cocok pada data panel. Jika hasil probabilitas Cross Section F dan Cross Section Chi Square Uji Chow lebih kecil dari 0,05

menunjukkan bahwa hipotesis penunjukan pendekatan model yang dipilih cocok ialah model FEM. Sebaliknya jika, Jika hasil probabilitas Cross Section F dan Cross Section Chi Square Uji Chow lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis penunjukan pendekatan model yang dipilih cocok ialah model CEM (Savitri *et al.*, 2021).

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Efek Test	Statistik	D.f	Probabilitas
Cross-Section F	200.27	(34,13)	0.00
Cross-Section Chi/quare	688.30	34	0.00

(Sumber : Data diolah)

Berdasarkan Tabel uji Chow di atas, kedua nilai probabilitas dari Cross Section F dan Cross Section Chi Square lebih kecil dari 0,05 sehingga menolak hipotesis nol yang menunjukan pemilihan model fixed effect, model yang terbaik digunakan adalah model yang menggunakan metode fixed effect. Berdasarkan hasil uji chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian berlanjut ke uji hausman.

Uji Chow

Uji hipotesis ialah teknik statistika yang bertujuan untuk memverifikasi sebuah asumsi atau klaim (hipotesis) berdasarkan informasi yang didapat dari sampel data. Uji Hipotesis bertujuan untuk memastikan apakah bukti yang ada cukup kuat untuk menerima atau menolak asumsi penulis berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Hasil Tes	Statistik	D.f	Probabilitas
Cross-Section Random	23.56	4	0.0001

(Sumber : Data diolah)

Berdasarkan table uji hausman di atas, nilai probabilitas dari hasil pengolahan uji hausman memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 sehingga menolak pemilihan REM, dan menjadikan model metode FEM sebagai pilihan model yang paling cocok dalam kalkulasi data regresi panel. (Candra & Irmeilyana, 2024) menyatakan bahwa pendekatan FEM menjadi pendekatan model paling cocok terhadap data panel penelitian maka, tidak diperlukan melakukan Uji Langrange Multiplier dan dapat diteruskan menuju Uji Multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi yang kuat antar variabel independent di suatu penelitian dalam data panel. Tujuan utama dari uji ini ialah untuk mengetahui in terkorelasi antar variabel independen yang dapat mempengaruhi validitas hasil regresi data panel. Jika nilai korelasi tidak lebih dari 0,85 maka korelasi antar variabel independen yang terkait tidak terjadi. Sementara jika nilai melebihi 0,85 maka terdapat korelasi pada variabel independen penelitian tersebut (Akbar et al., 2025).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	BM	BBS	BK	BP
BM	1.000	0.237	0.559	0.591
BBS	0.237	1.000	0.070	0.135
BK	0.559	0.070	1.000	0.690
BP	0.591	0.135	0.690	1.000

(Sumber: Data diolah)

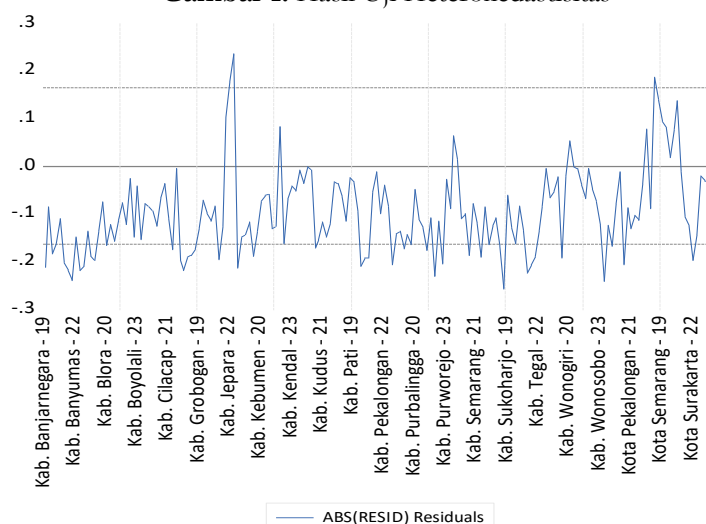
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada nilai korelasi yang melebihi 0,85 antara variabel independen satu dengan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas merupakan sebuah uji statistic dalam regresi linera berganda yang memiliki tujuan untuk mengetahui atau mendeteksi adanya ketidaksamaan variasi residual pada model regresi linear. Kesamaan variasi residual bisa dilihat dari perkembangan grafik uji tersebut, jika grafik uji tidak melewati batas 500 dan -500 maka dapat disimpulkan bahwa variasi residual sama, sementara jika grafik uji melewati batas 500 dan -500 maka dapat

disimpulkan bahwa variasi residual dalam uji heterokedastisitas tidak selaras (Akbar et al., 2025).

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas



Dari grafik residual warna biru dapat dilihat bahwa grafik tidak melewati batas 500 dan -500, yang berarti variasi residual sama. Oleh karena itu tidak terjadi peristiwa heterokedasitas atau seluruh varian residual lolos uji heterokedasitas. Selanjutnya, uji dapat dilanjutkan menuju Uji Simultan.

Uji Simultan

Uji F atau uji simultan Merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh gabungan dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat dalam sebuah model regresi. Secara ringkas, uji F bertujuan menilai apakah keseluruhan model regresi memiliki signifikansi secara statistik.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

Statistik F	249.85
Probabilitas Statistik F	0.000

(Sumber : Data diolah)

Diketahui nilai F-Statistic sebesar 249.85 dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar $0.000 < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa Variabel Independen (X) berpengaruh secara bersamaan (simultan) terhadap Variabel Dependen (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Uji R^2 atau uji koefisien Determinasi merupakan uji suatu ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 berada dalam rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi mengindikasikan kemampuan model yang lebih baik dalam merepresentasikan data.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Square R	0.985
Square R Disesuaikan	0.981

(Sumber : Data diolah)

Hasil Uji koefisien determinasi menyimpulkan bahwa Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.981 atau 98.19%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari BM (Belanja Modal), BBS (Belanja Bantuan Sosial), BK (Belanja Kesehatan), dan BP (Belanja Pendidikan) mampu menjelaskan variabel dependen Persentase Penduduk Miskin (Y) sebesar 98.193%. sedangkan sisanya yaitu 1.806% ($100 - \text{Nilai R-Squared Disesuaikan}$) Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Parsial

Uji T, atau yang sering disebut uji parsial, adalah metode statistik yang dipakai untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data, atau untuk melihat apakah rata-rata suatu sampel berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Uji ini sering digunakan dalam analisis hipotesis untuk mengevaluasi pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat, atau untuk menemukan perbedaan antara dua kumpulan data.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial

Variabel	Koefisiensi	Standar Error	Statistik T	Probabilitas
Y	9.186	0.803	11.430	0.000
BM	-0.006	0.014	-0.457	0.647
BBS	-0.000	0.002	-0.367	0.714
BK	-0.162	0.021	-7.403	0.000
BP	-0.085	0.029	-2.880	0.004

(Sumber : Data diolah)

Hasil dari olah uji data panel yang menggunakan pendekatan model FEM diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel BM dan variabel BBS memiliki Probabilitas sebesar 0.647 dan 0.714 lebih besar dari 0.5 yang berarti variabel BM dan variabel BBS tidak berpengaruh tidak positif kepada Persentase jumlah penduduk miskin. Pada kesempatan lain, variabel independen BK dan variabel independen BP memiliki Probabilitas sebesar 0.000 dan 0.004 kurang dari 0.5 yang berarti variabel BK dan variabel BP memiliki pengaruh negatif terhadap Persentase jumlah penduduk miskin (Y).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis ialah teknik statistika yang bertujuan untuk memverifikasi sebuah asumsi atau klaim (hipotesis) berdasarkan informasi yang didapat dari sampel data. Uji Hipotesis bertujuan untuk memastikan apakah bukti yang ada cukup kuat untuk menerima atau menolak asumsi penulis berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisiensi	Standar Error	Statistik T	Probabilitas
Y	9.186	0.803	11.430	0.000
BM	-0.006	0.014	-0.457	0.647
BBS	-0.000	0.002	-0.367	0.714
BK	-0.162	0.021	-7.403	0.000
BP	-0.085	0.029	-2.880	0.004

(Sumber : Data diolah)

Hasil yang didapat dari olahan variabel independen BM memiliki hasil yang berbeda dengan hipotesis sementara, hipotesis sementara menyatakan bahwa BM memiliki pengaruh negatif terhadap Y, Sementara hasil olahan regresi data panel dengan model FEM didapatkan bahwa BM tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Hasil yang didapat dari olahan variabel independen BBS memiliki hasil yang berbeda dengan hipotesis sementara, hipotesis sementara menyatakan bahwa BBS memiliki pengaruh negatif terhadap Y Sementara hasil olahan regresi data panel dengan model FEM didapatkan bahwa BBS tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Hasil yang didapat dari olahan variabel independen BK memiliki hasil yang sama dengan hipotesis sementara, hipotesis sementara menyatakan bahwa BK memiliki pengaruh negatif terhadap Y, Sementara hasil olahan regresi data panel dengan model FEM didapatkan bahwa Belanja Kesehatan (X3) memiliki pengaruh terhadap Y. Hasil yang didapat dari olahan variabel independen BP memiliki hasil yang sama dengan hipotesis sementara, hipotesis sementara menyatakan bahwa BP memiliki pengaruh negatif terhadap Y. Sementara hasil olahan regresi data panel dengan model FEM didapatkan bahwa BP memiliki pengaruh terhadap Y.

Pembahasan

Berdasarkan hasil Analisa yang didapatkan oleh (Triyulianto et al., 2024), Belanja Modal yang hingga saat ini digelontorkan oleh pihak berwenang tidak memiliki pengaruh dalam mengurangi Jumlah Persentase Penduduk Miskin. Belanja Modal yang digelontorkan oleh Pemda di seluruh provinsi di Indonesia tidak bisa digunakan untuk mendeteksi pengurangan angka jumlah Persentase Penduduk Miskin. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang didapatkan, Variabel independen (X) yang memiliki pengaruh terhadap Variabel dependen (Y) Persentase

Jumlah Penduduk Miskin yaitu variabel independen BK dan BP memiliki pengaruh negatif terhadap Persentase Jumlah Penduduk Miskin. Sementara itu, Variabel independen BM dan BBS tidak memiliki pengaruh sama sekali kepada problematika persentase jumlah penduduk miskin. Belanja Modal yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ngawi. Penelitian yang dilakukan oleh (Amami & Asmara, 2022) berkesimpulan bahwa belanja modal yang digelontorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi selama lima belas tahun terakhir belum mampu digunakan secara optimal dalam menunjang fasilitas-fasilitas penting yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi itu sendiri.

Berdasarkan hasil Analisa yang didapatkan, Belanja Bantuan Sosial yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah tidak memiliki pengaruh dalam mengurangi Jumlah Persentase Penduduk Miskin. Belanja bantuan sosial tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penurunan persentase jumlah masyarakat miskin dikarenakan pengeluaran tersebut bukan menjadi fokus utama yang dianggarkan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, peneliti juga menyebutkan masih banyak faktor lain yang mampu menekan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku (Triyulianto et al., 2024).

Berdasarkan hasil Analisa yang didapatkan, Belanja Kesehatan yang di anggarkan oleh pemerintah memiliki pengaruh Negatif dalam mengurangi Persentase Jumlah Penduduk Miskin. Belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap Persentase jumlah penduduk miskin di Kota Manado. Peneliti menekankan pada anggaran Belanja Operasional Kesehatan (BOK) yang di anggarkan Pemerintah Daerah Kota Manado yang dinilai efektif dalam menekan persentase jumlah penduduk miskin (Demak et al., 2020)(Gusmardi et al., 2023).

Belanja Pendidikan berpengaruh negatif terhadap persentase jumlah penduduk miskin. Mardiana, (2021) Berpendapat bahwa kebutuhan dasar siswa seperti seragam, buku tulis, alat tulis dan kebutuhan siswa lainnya dapat mengurangi beban orang tua siswa dikarenakan Belanja Pendidikan sudah mengkover sebagian besar dari pengeluaran urusan pendidikan yang dikeluarkan oleh Ibu/Bapak siswa dan diharapkan dapat mengurangi persentase jumlah penduduk miskin (Mardiana, 2021). Pendidikan berkontribusi pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendorong terciptanya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena, Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keterampilannya diharapkan dapat berkembang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja (Hartono, 2023).

5. Kesimpulan

BM tidak memiliki pengaruh terhadap persentase jumlah penduduk Miskin, yang artinya bahwa besar kecilnya BM yang dibelanjakan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah sama sekali tidak dapat mempengaruhi usaha Pemerintah dalam menurunkan Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah. BBS tidak memiliki pengaruh terhadap persentase jumlah penduduk Miskin, yang artinya bahwa besar kecilnya BBS yang dibelanjakan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah sama sekali tidak dapat mempengaruhi usaha Pemerintah dalam menurunkan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah. BK memiliki pengaruh negatif terhadap persentase jumlah penduduk miskin, artinya semakin besar BK yang dianggarkan dan dibelanjakan dalam rangka kesehatan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dapat mengurangi persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah. BP memiliki pengaruh negatif terhadap persentase jumlah penduduk miskin, artinya semakin besar BP yang dianggarkan dan dibelanjakan untuk urusan pendidikan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dapat mengurangi persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus dapat melakukan penganggaran belanja modal yang lebih baik dan efisien. Berhenti untuk merealisasikan program dengan tujuan yang kurang jelas dan lebih fokus terhadap penanganan problematika yang terjadi di masyarakat. Pemerintah daerah harus lebih bijak dalam menganggarkan dan membelanjakan anggaran tersebut berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Hendaknya Pemerintah Daerah dapat mempermudah proses pencairan dana bantuan sosial, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial dikarenakan proses pengurusan dana bantuan yang terkesan ribut dan membingungkan. Pemerintah diharapkan dapat kembali mengklasifikasikan belanja kesehatan menjadi belanja wajib (Mandatory Spending), hal ini untuk menjamin bahwa setiap periode penganggaran belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dapat menyisihkan sebagian dari total anggaran belanja untuk

memenuhi anggaran belanja kesehatan yang bersifat wajib. Disarankan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengkaji ulang Belanja Modal yang dibelanjakan untuk lebih condong ke arah belanja yang sekiranya dapat meningkatkan perekonomian daerah, terutama daerah-daerah yang masih tertinggal atau minim infrastruktur yang memadai, diharapkan dari belanja pembangunan infrastruktur tersebut dapat memajukan perekonomian daerah, yang berdampak pada penurunan Persentase Jumlah Penduduk Miskin.

Kontribusi Penulis: Penelitian ini sepenuhnya dilakukan oleh Daffa Talenta mulai dari penyusunan kerangka penelitian, pengumpulan data dan analisis data, hingga penyusunan akhir naskah artikel

Pendanaan: Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Sumber Referensi

- Abidin, Z., Prabantarkso, R. M., Wardhani, R. A., & Endri, E. (2021). Analysis of Bank Efficiency Between Conventional Banks and Regional Development Banks in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 741–750. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.741>
- Agung Prasetyo, A. (2022). Meminimalisir Asimetri Informasi Melalui Pelaporan (Disclosure) Laporan Keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.104>
- Akbar, M. D., Rizki, R., & Atika, A. (2025). the Influence of Green Accounting and Profitability on the Value of Mining and Manufacturing Companies Registered on the Jakarta Islamic Index Period 2018-2022. *Jurnal Maneksi*, 14(2), 511–519. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i2.2964>
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Candra, S. F., & Irmeilyana, I. (2024). Model Regresi Data Panel pada Pengaruh Faktor Curah Hujan Terhadap Produksi Kopi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021. *Jurnal Penelitian Sains*, 26(1), 30. <https://doi.org/10.56064/jps.v26i1.916>
- Demak, S. N. K., Masinambow, V. A. J., & Londa, A. T. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Modal dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(1), 145–155. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/28171/27622>
- Ester Trivona. (2021). Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi E-ISSN: 2460-0585*, 10(6). <https://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4056>
- Gunadi, Wibawa, H., Hakim, M. S., Marcellus, Trisnawati, I., Khair, R. El, Triasih, R., Irene, Afiahayati, Iskandar, K., Siswanto, Anggorowati, N., Daniwijaya, E. W., Supriyati, E., Nugrahaningsih, D. A. A., Budiono, E., Retnowulan, H., Puspawati, Y., Puspitawati, I., ... Inggriani, M. P. (2021). Molecular epidemiology of SARS-CoV-2 isolated from COVID-19 family clusters. *BMC Medical Genomics*, 14(1), 144. <https://doi.org/10.1186/s12920-021-00990-3>
- Gusmardi, G., Amir, A., & Syafri, M. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 1117. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1106>
- Hafiz, M., & Kurniadi, A. P. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 8(2). <https://doi.org/10.15548/jebi.v8i2.864>
- Hartono, D. (2023). Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Penanggulan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 405–411. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/mirai.v8i1.4276>
- Indonesia, P. P. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/208228/pp-no-18-tahun-2022>

- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , (2) agency, and (3) finance to develop a theory of ownership struct. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360. [https://josephmahoney.web.illinois.edu/BA549_Fall_2012/Session_5/5_Jensen_Meckling_\(1976\).pdf](https://josephmahoney.web.illinois.edu/BA549_Fall_2012/Session_5/5_Jensen_Meckling_(1976).pdf)
- Kemenkeu. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. *Law*, 18(2), 4–6. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/bba8dbbb-6065-4b4c-aa2f-33618f2d2485/uu-apbn-tahun-2021.pdf>
- Kemenkeu. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472*, 670. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254789/pmk-no-62-tahun-2023>
- Kemiskinan, B. profil. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, (47), 1–16. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Mardiana, R. (2021). *Pengaruh Belanja Bidang Kesehatan Dan Belanja Bidang Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor (Periode Tahun 2013 – 2019)*. Universitas Pakuan Bogor.
- Ningtias, E. N. A., & Anwar, A. F. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.24252/best.v1i1.19637>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129443/permensos-no-1-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2020). <https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>
- Putri, N. W., & Rahmah, S. P. (2020). Edukasi Kesehatan untuk Isolasi Mandiri dalam Upaya Penanganan COVID-19 di Kanagarian Koto Baru, Kabupaten Solok. *Jurnal Abdidas*, 1(6), 547–553. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.124>
- Putri, R. Z., & Effendi, M. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 356–366. <https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2339>
- Rubi, S., & Fitra, H. (2025). Pengaruh Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jambi. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 7(1), 406–416. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i1.2049>
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., Khadrinur, H., & Putri, M. I. (2022). Teori agensi : Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2434–2439. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2757>
- Savitri, C., Faddila, S. P., Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., & Sihombing, P. (2021). Multivariate Statistics In Research. In I. Ahmaddien (Ed.), *Widina* (Number 15018). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/351950/statistik-multivariat-dalam-riset>
- Triyulianto, T., Nurvita, B. S. R., & Hidayaturahmi. (2024). Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan Pembangunan adalah proses yang memiliki tujuan untuk melakukan pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar nega. *Jurnal Good Governance*, 20(4), 111–128. <http://repository.stialan.ac.id/id/eprint/329>